

# KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA

## THE DEFENDING THE STATE CURRICULUM IN HIGH EDUCATION LEVEL: THE PROSPECTIVE OF IMBALANCES IN INDONESIAN DEFENSE SYSTEM

Erlinda Matondang<sup>1</sup>

Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia  
(erlinda.matondang@gmail.com)

**Abstrak**—Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat poin pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI. Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan kesetimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan kesetimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiliter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, dan potensi generasi muda.

**Kata Kunci:** bela negara, kesetimbangan, ketimpangan, kurikulum, sistem pertahanan

**Abstract**—Defending the state is one of many efforts of Indonesian Defense Ministry to arrange nonmilitary defense strength. In the implementation, this policy pushes the formation for defending the state curriculum. The applied curriculum consists of four learning points, namely, citizenship training, obligatory military exercises, professions based training, and Indonesian military style exercises. This curriculum has five foundation values, namely, pro-patria, willing to sacrifice, awareness as the citizenship and nationality, Pancasila as the country's ideology, and the capability to defend the state, both physically and psychologically. The curriculum applied by government has the prospect of the imbalances of Indonesian defense system requiring the balance of military and nonmilitary defense. This article discusses that prospect by formulating the interaction balance of

<sup>1</sup> Penulis adalah sarjana ilmu politik dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan magister ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

military and nonmilitary defense resulting defense posture with its three elements, namely, strength, capability, and deployment. The result shows that the care for country education happening could produce the imbalances in Indonesian defense system. Therefore, the change of formation and implementation of defending the state curriculum method is needed very much. Additionally, the target of this education should be moved to high educational level by considering the ripeness of thought, the forming of characteristic, and the potency of youth generations.

**Keywords:** *defending the state, balance, imbalance, curriculum, defense system*

## Pendahuluan

Pertahanan merupakan istilah yang kerap kali diartikan sebagai tugas militer. Pada dasarnya, militer merupakan istilah yang digunakan untuk mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh personel berseragam yang disebut tentara. Sementara itu, pertahanan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mempertahankan negara yang tidak hanya melibatkan tentara, tetapi juga masyarakat sipil.<sup>2</sup> Hal ini pula yang tergambar dalam istilah bela negara.

Upaya bela negara tidak hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Kewajiban bela negara diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia berlandaskan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.<sup>4</sup> Keempat hal ini merupakan paradigma nasional yang menjadi kerangka berpikir masyarakat Indonesia terkait pelbagai permasalahan nasional.

Hal ini pula yang mendasari pelaksanaan pendidikan bela negara oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pendidikan ini dilaksanakan melalui empat poin pembelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, pelatihan ala TNI, dan pelatihan sesuai profesi masing-masing.<sup>5</sup> Keempat poin ini bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pertahanan semesta. Apalagi ada lima nilai dasar yang menjadi inti kurikulum pendidikan bela negara, yaitu cinta tanah air, rela

<sup>2</sup> KA Muthanna, "Military Diplomacy," dalam *Journal of Defense Studies*, Vol. 5. No.1, Januari 2011, hlm. 2.

<sup>3</sup> Direktorat Pengkajian Bidang Pertahanan dan Keamanan, "Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 15, Mei 2013, hlm. 88.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>5</sup> Anonim, "Apa beda bela negara dan wajib militer?," [m.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709397/apa-beda-bela-negara-dan-wajib-militer](http://m.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709397/apa-beda-bela-negara-dan-wajib-militer), 14 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015.

berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik.<sup>6</sup>

Pendidikan bela negara merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menciptakan komponen cadangan yang sudah diajukan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Komponen Cadangan sejak tahun 2013. Pendidikan bela negara tidak sama dengan wajib militer. Namun, komponen cadangan mengandung unsur wajib militer karena tidak adanya unsur sukarela di dalam pelaksanaan. Setiap warga negara diharuskan untuk menghadiri pendidikan komponen cadangan jika mendapatkan panggilan dari pemerintah.<sup>7</sup>

Walaupun Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu, menyatakan bahwa pendidikan bela negara akan dilakukan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga pensiunan, dalam RUU Komponen Cadangan menyatakan bahwa pendidikan seperti ini wajib diikuti oleh warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas.<sup>8</sup> Dengan demikian, remaja yang baru saja lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau mahasiswa merupakan target utama dari pendidikan bela negara dan pembentukan komponen cadangan.

Jika meninjau pada nilai yang menjadi inti pada pendidikan bela negara, semuanya sudah disampaikan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SMA atau sederajat. Di beberapa universitas juga sudah menetapkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Namun, dalam kurikulumnya tidak ada wajib militer dan pelatihan ala TNI, sehingga pemahaman militer menjadi sangat minim.

Indonesia mempunyai 3.813 perguruan tinggi dengan rasio jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta sebesar 1:10. Pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari lima jenis,

<sup>6</sup> Anonim, "Menteri Pertahanan buka program bela negara," [www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/20/151022\\_indonesia\\_bela\\_negara](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/20/151022_indonesia_bela_negara), 22 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015.

<sup>7</sup> Anonim, "Apa beda bela negara dan wajib militer?," [m.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709397/apa-beda-bela-negara-dan-wajib-militer](http://m.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709397/apa-beda-bela-negara-dan-wajib-militer), 14 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015.

<sup>8</sup> *Ibid.*

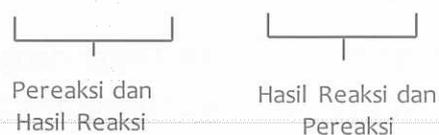
yaitu universitas, akademik, institut, sekolah tinggi, dan politeknik.<sup>9</sup> Dari perguruan tinggi tersebut, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan pada dekade terakhir. Bahkan, jumlah mahasiswa perempuan jauh lebih banyak daripada mahasiswa laki-laki.<sup>10</sup>

Artikel ini mengulas kurikulum yang diterapkan di Pendidikan Tinggi, baik itu universitas, akademi, institut, sekolah tinggi maupun politeknik, terkait dengan pendidikan bela negara. Bagaimana kemungkinan pendidikan negara memunculkan ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang menuntut warga negara Indonesia berpartisipasi aktif dalam upaya pertahanan melalui profesi masing-masing? Pertanyaan ini merupakan rumusan masalah yang menjadi fokus penjelasan dalam artikel ini. Oleh karena itu, artikel ini diberi judul “Kurikulum Bela Negara di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan dalam Sistem Pertahanan Indonesia.”

### Teori Reaksi Keseimbangan dalam Sistem Pertahanan Indonesia Sistem Pertahanan Semesta

Reaksi keseimbangan merupakan salah satu teori dalam keilmuan kimia. Keseimbangan dalam suatu sistem sosial, termasuk pertahanan, bersifat dinamis. Dengan demikian, teori reaksi keseimbangan yang digunakan dalam kajian ini adalah keseimbangan dinamis (*equilibrium reaction*). Di dalam sistem keseimbangan ini, reaksi yang berlangsung dari pereaksi ke hasil reaksi mempunyai kecepatan yang sama untuk arah yang berlawanan.<sup>11</sup> Adapun reaksi ini seperti yang digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Pola Reaksi Keseimbangan



<sup>9</sup> Bank Dunia, “Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif terhadap Pasar Kerja?,” *Policy Brief* 89222, Mei 2014, hlm. 5.

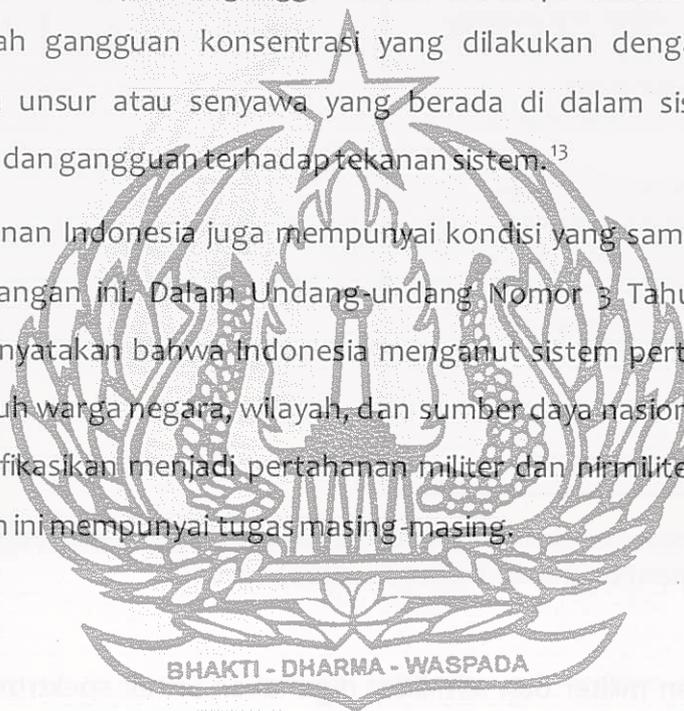
<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>11</sup> Y. Sunarya dan A. Setiabudi, *Mudah dan Aktif Belajar Kimia: untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam*, (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 104.

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa ada *reversible process* yang terjadi dalam suatu reaksi. Interaksi dari dua pereaksi, yaitu A dan B, dapat menghasilkan C dan D yang juga bereaksi untuk menghasilkan A dan B. Hal ini pun berlaku untuk sistem dengan tiga atau lebih pereaksi dan hasil reaksi. Dengan kata lain, ada suatu pola yang menunjukkan bahwa hasil reaksi memberikan dampak pada pereaksi dan hasil berikutnya. Oleh karena itu, penentuan posisi pereaksi dan hasil reaksi dilakukan berdasarkan arah reaksi.

Pada satu titik tertentu, baik pereaksi maupun hasil reaksi tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Titik ini yang disebut dengan titik kesetimbangan. Titik ini tidak dipengaruhi pada kuantitas awal pereaksi, tetapi disesuaikan dengan suhu sistem reaksi.<sup>12</sup> Kesetimbangan ini dapat terganggu akibat beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah gangguan konsentrasi yang dilakukan dengan penambahan kuantitas molar pada unsur atau senyawa yang berada di dalam sistem; gangguan terhadap suhu sistem; dan gangguan terhadap tekanan sistem.<sup>13</sup>

Sistem pertahanan Indonesia juga mempunyai kondisi yang sama dengan sistem pada reaksi kesetimbangan ini. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Dalam sistem ini, pertahanan diklasifikasikan menjadi pertahanan militer dan nonmiliter. Setiap bagian dari sistem pertahanan ini mempunyai tugas masing-masing.



---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 109—113.

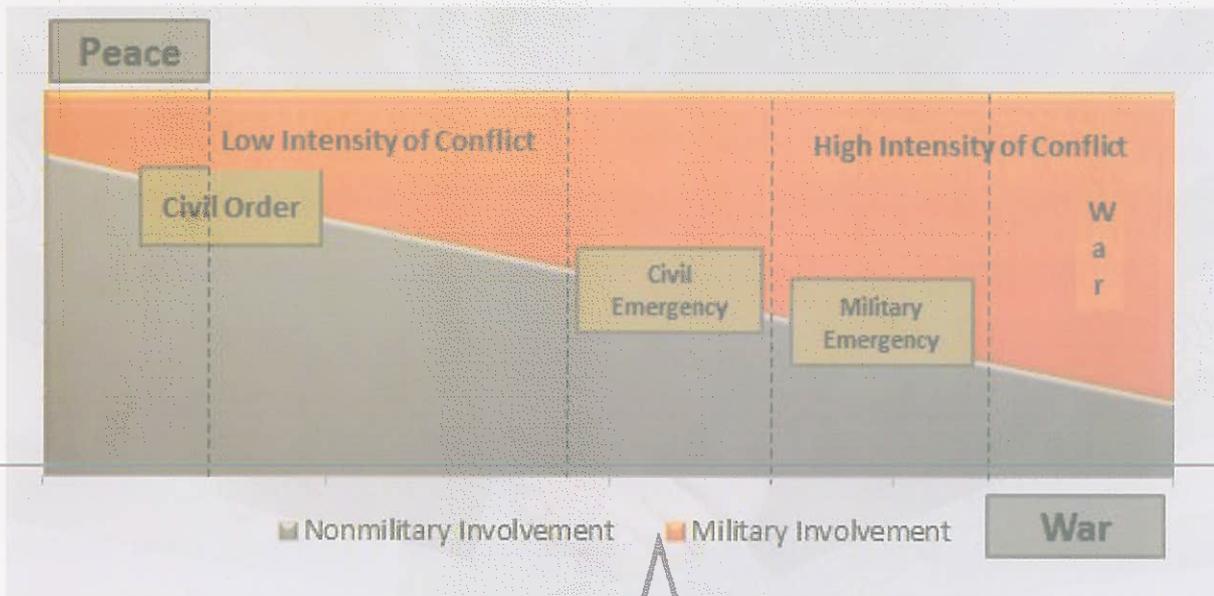
Gambar 2. Sistem Pertahanan Indonesia



Sumber: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, (Jakarta: Departemen Pertahanan Indonesia, 2008), hlm. 118.

Pertahanan militer dan nirmiliter digunakan untuk spektrum tertentu, khususnya berkaitan dengan pelibatan sipil dalam suatu kegiatan pertahanan. Pertahanan sipil dibentuk bukan untuk selalu mengangkat senjata seperti yang dilakukan TNI, melainkan untuk melakukan fungsi dan profesinya dengan tetap berorientasi pada upaya membangun dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia. Pelibatan sipil dan militer dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Spektrum Konflik dan Pelibatan Kekuatan Pertahanan<sup>14</sup>



Sumber: E. Matondang, "Defense Diplomacy on Indonesia's Perspective," dipaparkan dalam Short Course in Defense Diplomacy IDU di Naval Postgraduate School, Monterey pada 31 Juli 2015.

Untuk menghasilkan pertahanan yang kuat atau menyukseskan upaya pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, diperlukan pertahanan militer dan nirmiliter yang sinergis dengan pelaksanaan tugas atau kinerja sesuai dengan porsinya. Pertahanan yang kuat atau kesuksesan upaya pembangunan kekuatan pertahanan merupakan hasil dari reaksi antara pertahanan militer dan nirmiliter. Pola reaksi dalam sistem pertahanan semesta ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa postur pertahanan terdiri dari kekuatan, kemampuan, dan pengeluaran pertahanan. Sebagaimana sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta, ketiga unsur pembentuk postur pertahanannya sangat bergantung dari formulasi pertahanan militer dan nirmiliter. Pola ini akan mencapai kesetimbangan jika formulasi PM dan PN menghasilkan S, C, dan D yang stabil.

<sup>14</sup> Gambar diadopsi dari Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 49.

**Gambar 4.** Pola Reaksi Sistem Pertahanan Semesta

Keterangan:

PM : Pertahanan Militer

PN : Pertahanan Nirmiliter

PP : Postur Pertahanan

S : Strength (Kekuatan Pertahanan)

C : Capability (Kemampuan Pertahanan)

D : Deployment (Penggelaran Pertahanan)

Sumber: Diolah oleh penulis

Jika dalam reaksi kesetimbangan, ada tiga hal yang dapat mempengaruhi sistem yang sudah setimbang, yaitu tekanan, suhu, dan penambahan molaritas atau konsentrasi zat, dalam pola reaksi sistem pertahanan semesta juga terjadi hal yang sama dengan nama yang berbeda. Tekanan pada reaksi kesetimbangan diartikan sebagai politik nasional dan internasional. Sebagaimana asal tekanan yang dapat berasal dari luar dan dari dalam sistem, politik nasional dan internasional juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kesetimbangan dari sistem pertahanan semesta. Dukungan dan tuntutan negara-negara di dunia serta friksi-friksi politik dalam legislatif Indonesia merupakan bagian dari tekanan terhadap sistem pertahanan semesta.

Sementara suhu dalam reaksi kesetimbangan digambarkan dengan isu yang sedang mencuat dan menjadi perhatian warga negara Indonesia dan masyarakat internasional. Penggunaan postur pertahanan Indonesia selalu disesuaikan dengan iklim interaksi antarnegara. Dengan demikian, kesetimbangan sistem pertahanan semesta sangat dipengaruhi oleh isu yang sedang berkembang dalam masyarakat domestik dan internasional.

Pengaruh terakhir yang masih menjadi permasalahan utama dalam implementasi sistem pertahanan semesta di Indonesia adalah kuantitas dan kualitas dari setiap unsur yang ada dalam pola interaksi tersebut, baik itu PM, PN, S, C, maupun D. Hal ini yang disebut dengan molaritas dalam reaksi kesetimbangan kimia.

## Kurikulum Bela Negara

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan bela negara diiringi dengan pelbagai pertanyaan terkait kurikulum yang disampaikan pada pelbagai jenjang pendidikan. Kurikulum tersebut harus bersesuaian dengan prinsip penyusunan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kurikulum tersebut juga harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Secara teoritis, ada dua jenis pendekatan yang digunakan dalam membentuk kurikulum pendidikan tinggi, yaitu model serial dan paralel.<sup>15</sup> Pendekatan serial ditunjukkan dengan adanya mata perkuliahan yang mempunyai kompetensi yang sama pada setiap semester. Sementara itu, model paralel ditunjukkan dengan pencapaian satu kompetensi yang utuh dalam satu semester, sehingga mata kuliah di semester lain tidak menghasilkan kompetensi seperti yang sedang berlangsung. Kedua pendekatan ini lebih mengarah pada metode pelaksanaan kegiatan perkuliahan.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu kurikulum adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ditetapkan pada tahap awal pembentukan kurikulum. Capaian pembelajaran dibentuk dengan struktur mengerucut pada hal-hal yang lebih akuntabel dan reliabel. Capaian pembelajaran ini yang menjadi penentu bahan kajian yang diberikan kepada mahasiswa.<sup>16</sup>

Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.<sup>17</sup> Sikap didefinisikan sebagai perilaku yang berbudaya sebagai hasil dari pembelajaran dan penanaman nilai dan norma. Sikap tercermin dari kehidupan spiritual, personal, sosial, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian masyarakat.<sup>18</sup> Keterampilan umum merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin kesetaraan kemampuan

---

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014), hlm. 22.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikannya. Sementara itu, keterampilan khusus merupakan kemampuan khusus wajib dari mahasiswa yang sesuai dengan bidang studi atau keilmuannya.<sup>19</sup> Pengetahuan adalah penguasaan atau pemahaman konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu yang diperoleh mahasiswa melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pembentukan pengalaman, penelitian, dan pengabdian masyarakat.<sup>20</sup>

Sikap bela negara yang diharapkan dimiliki oleh bangsa Indonesia didasarkan pada empat kerangka pemikiran. Pertama adalah Pancasila sebagai landasan dasar atau idiil. Pancasila merupakan landasan dasar negara yang harus digunakan dalam berpikir dan bertindak untuk kepentingan negara Indonesia. Kedua adalah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan tujuan negara. Hal ini diperjelas dalam Pasal 30 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib membela dan mempertahankan negara. Undang-undang Dasar 1945 ini merupakan landasan konstitusional sikap bela negara. Ketiga adalah wawasan nusantara sebagai landasan visional. Keempat adalah ketahanan nasional sebagai landasan konseptual.<sup>21</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, sikap bela negara tidak terbatas pada kemampuan seorang warga negara Indonesia dalam melakukan peperangan atau menjadi anggota militer. Apapun profesinya, dimanapun keberadaannya, bagaimanapun upaya yang dapat dilakukannya, seluruhnya diharapkan dapat menjadi bagian dari aktivitas pertahanan negara. Dengan demikian, kurikulum bela negara yang dibentuk di setiap tingkat pendidikan seharusnya berdasarkan pada jurusan atau program studi yang diminati oleh setiap individu masyarakat.

Untuk kurikulum pendidikan bela negara yang berupa pelatihan singkat saat ini, mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik.<sup>22</sup> Kelima nilai ini seharusnya sudah mempunyai capaian

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Direktorat Pengkajian Bidang Pertahanan dan Keamanan, *op.cit.*, hlm. 90.

<sup>22</sup> Anonim, "Menteri Pertahanan buka program bela negara," [www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/20/151022\\_indonesia\\_bela\\_negara](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/20/151022_indonesia_bela_negara), 22 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015.

pembelajaran. Unsur sikap dalam kurikulum ini mengacu pada pelbagai upaya yang diharapkan dapat dibentuk seiring dan setelah pelatihan bela negara berdasarkan profesi. Unsur keterampilan umum dan keterampilan khusus ini yang perlu dipertanyakan jika pelatihan dilakukan secara militer atau ala TNI.

Keterampilan militer tidak lagi menjadi keterampilan khusus jika dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pelatihan sesuai profesi tidak dapat mengasah keterampilan khusus masyarakat sesuai dengan kemampuan bidang yang sudah ada. Dengan kata lain, sebagian besar pelatihan dalam kurikulum bela negara lebih mengarahkan masyarakat Indonesia pada keterampilan militer dengan jiwa atau nilai-nilai yang sebenarnya sudah diajarkan pada generasi-generasi Indonesia sejak mengenyam pendidikan di bangku SD hingga perguruan tinggi.

Sebenarnya unsur pengetahuan yang paling penting dalam pelatihan ini. Unsur pengetahuan yang dapat mendorong sikap bela negara seharusnya menjadi inti dari kurikulum bela negara. Adanya kesalahan dalam memahami pertahanan sebagai militer merupakan permasalahan utama di Indonesia. Oleh karena itu, pertahanan nirmiliter Indonesia tidak pernah utuh. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses legislasi RUU Komponen Cadangan yang merupakan senjata utama membangun pertahanan nirmiliter Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan bela negara seharusnya menjadi penekanan pada setiap jenjang pendidikan dan ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi, bukan Kementerian Pertahanan. Hal yang perlu diingat adalah Kementerian Pertahanan dan pertahanan militer Indonesia mempunyai komitmen dan visi yang belum tercapai hingga saat ini, yaitu kemandirian industri pertahanan dan pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) yang merupakan fokus pembangunan kekuatan pertahanan militer.<sup>23</sup>

Untuk mencapai kedua hal tersebut, Indonesia mempunyai teknologi dan sumber daya yang belum memadai. Sumber daya Indonesia yang belum memadai itu ditunjukkan melalui pelbagai indikator, seperti penguasaan teknologi, peranan lembaga penelitian

<sup>23</sup> E. Matondang, *Anggaran Pertahanan sebagai Dinamisator Diplomasi Pertahanan dalam Joint Development Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment (Periode 2009—2014)*, Tesis, (Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia, 2015), hlm. 57.

dan pengembangan nasional yang minim, dan disintegrasi industri pertahanan. Faktor ini yang melemahkan postur pertahanan Indonesia.<sup>24</sup>

## Prospektif Ketimpangan dalam Sistem Pertahanan Indonesia

### Pertahanan Militer

Pertahanan militer Indonesia mempunyai tugas yang disebut dengan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Dalam kedua tugas ini, ada lebih dari 15 subtugas yang harus dilakukan oleh TNI. Untuk melakukan tugas tersebut, TNI harus didukung dengan postur pertahanan militer yang ditinjau dari kekuatan, kemampuan, dan penggelaran kekuatan TNI.

Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam *The Military Balance 2014*, kekuatan TNI ditunjukkan dengan jumlah prajurit aktif sebesar 395.500, yang terdiri dari 300.400 orang prajurit TNI Angkatan Darat, 65.000 orang prajurit TNI Angkatan Laut, dan 30.100 orang prajurit TNI Angkatan Udara.<sup>25</sup> Prajurit ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana militer, termasuk alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Pertahanan militer Indonesia saat ini mempunyai sejumlah peralatan militer strategis dengan *deterrence effect* yang tinggi. Adapun peralatan tersebut adalah dua kapal selam, satu skuadron F-5E/F Tiger II, satu skuadron F-16A/B *Fighting Falcon*, satu skuadron Su-27SK/SKM *Flanker* dan Su-30M/MK2 *Flanker*, serta tiga skuadron Hawk MK-53/Mk109/Mk209.<sup>26</sup> Seluruh peralatan strategis tersebut adalah buatan negara lain dan saat ini membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, dalam visi dan misi pertahanan Indonesia dicantumkan kemandirian dan modernisasi guna mencapai MEF.

Kemampuan pertahanan Indonesia sangat dibatasi oleh anggaran pertahanan yang masih sangat minim. Walaupun ada peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi negara, anggaran pertahanan tidak berkembang berdasarkan hal tersebut. Perkembangan anggaran pertahanan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

<sup>24</sup> Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Indonesia 2005—2025 Buku Putih*, (Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2006), hlm. 10-12.

<sup>25</sup> The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2014*, (New York: Routledge, 2014), hlm. 247.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

**Tabel 1.** Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), GDP, %APBN, dan %GDP Tahun 2010—2014

No.	Alokasi	2010	2011	2012	2013	2014
1.	APBN Kemhan/TNI	52.352,26	58.192,13	74.106,44	84.478,54	83.427,72
2.	GDP	6.253.800,00	7.226.900,00	8.542.600,00	9.293.210,00	10.335.570,00
3.	APBN	1.126.100,00	1.548.310,40	1.548.310,40	1.683.011,10	1.800.000,00
4.	GDP/APBN	5,50	5,47	5,51	5,52	5,50 (est.)
5.	% Anggaran Pertahanan terhadap GDP	0,84	0,81	0,87	0,91	0,81
6.	% Anggaran Pertahanan terhadap APBN	4,65	4,41	4,79	5,02	4,63

Sumber: Kemhan (2014) dalam Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 670.

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa anggaran pertahanan mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2012. Namun, perkembangan itu tidak mengikuti pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perkembangan anggaran untuk pertahanan tidak mengikuti visi dan misi pembangunannya.<sup>27</sup>

Kekuatan pertahanan militer Indonesia digelar dipelbagai wilayah Indonesia. TNI AD membentuk 13 Komando Daerah Militer (KODAM) untuk pertahanan darat.<sup>28</sup> TNI AL membentuk dua komando armada, yaitu Komando Armada Barat (Koarmabar), dan Komando Armada Timur (Koarmatim). Komando ini akan diubah menjadi tiga dengan pusat di Riau untuk Koarmabar, Papua untuk Koarmatim dan di Makassar untuk Komando Armada Tengah dengan wilayah operasi di Kupang dan Tahuna.<sup>29</sup> Sementara itu, TNI AU juga membentuk dua komando pertahanan udara wilayah barat dan timur.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> E. Matondang, *op.cit*, hlm. 57.

<sup>28</sup> The International Institute for Strategic Studies, *op.cit.*, hlm. 248.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

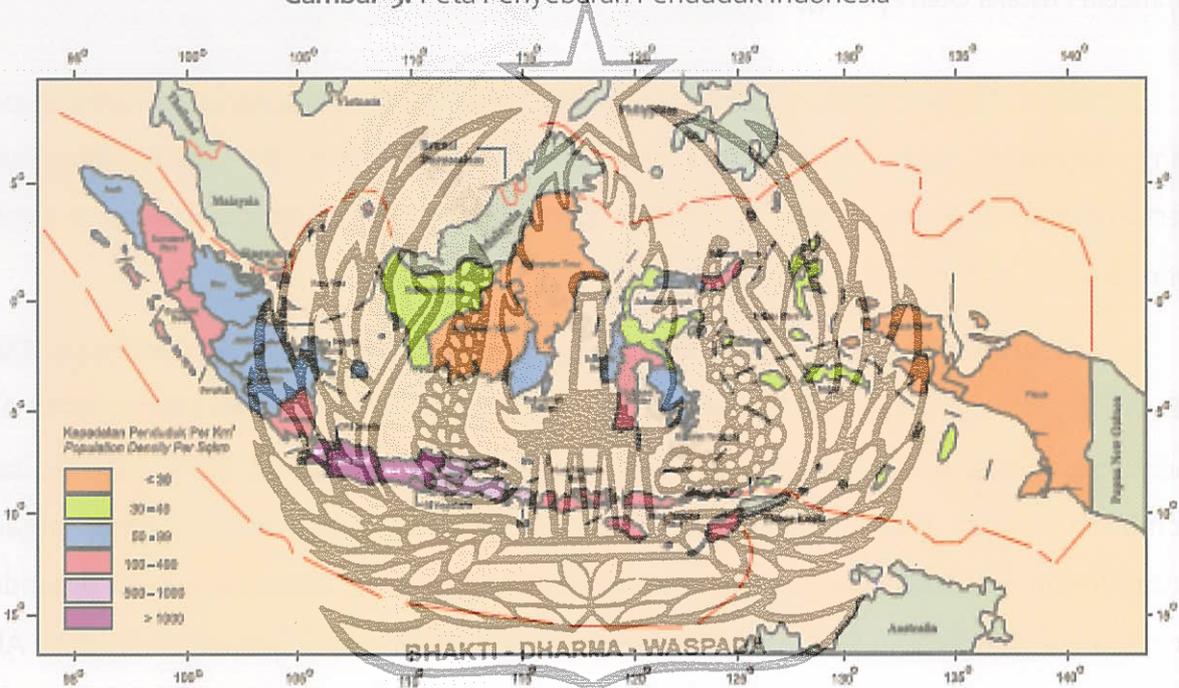
<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

## Pertahanan Nirmiliter

Pertahanan nirmiliter berada ditangan rakyat Indonesia. Negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini mempunyai populasi sebanyak 251.160.124.<sup>31</sup> Penyebaran populasi ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 menunjukkan bahwa wilayah Indonesia dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa ini merupakan potensi yang sangat besar dalam membangun kekuatan pertahanan nirmiliter yang mendukung pertahanan objek vital strategis, seperti istana negara dan bangunan peninggalan sejarah yang sebagian besar terpusat di Pulau Jawa.

Gambar 5. Peta Penyebaran Penduduk Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2014*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm.iii.

Sebagian dari populasi tersebut berada di usia produktif, yaitu usia 30—64 tahun, sedangkan populasi pada usia mahasiswa lebih dari 3%. Sementara itu, penduduk yang memasuki usia wajib bela negara lebih dari 4%. Persentase usia populasi Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

Tabel 2. Persentase Populasi Indonesia Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Age	0-14	15-19	20-24	25-29	30-64	65 plus
Male	9.3%	3.3%	3.6%	3.7%	23.5%	6.8%
Female	8.8%	3.1%	3.4%	3.5%	23.1%	7.9%

Sumber: The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2014*, (New York: Routledge, 2014), hlm. 247.

Tabel 3. Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2012/2013

Provinsi Province	Jumlah Perguruan Tinggi Number of Universities		Jumlah Mahasiswa Number of Students		Jumlah Tenaga Edukatif Number of Lecturers	
	Negeri State	Swasta Private	Negeri State	Swasta Private	Negeri State	Swasta Private
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3	102	48.709	49.128	2.241	5.160
Sumatera Utara	3	255	45.582	376.092	3.027	10.958
Sumatera Barat	5	189	67.878	92.733	3.067	3.378
Riau	3	75	24.750	75.261	1.234	2.692
Jambi	1	79	16.400	28.171	737	1.243
Sumatera Selatan	2	110	37.234	133.285	1.499	4.334
Bengkulu	1	16	15.915	6.210	719	1.119
Lampung	3	73	17.741	48.894	1.311	2.668
Kepulauan Bangka Belitung	1	23	3.177	1.028	178	250
Kepulauan Riau	1	21	2.038	2.799	54	1.024
DKI Jakarta	1	40	70.478	584.109	353	20.537
Jawa Barat	10	111	187.027	537.198	548	18.594
Jawa Tengah	10	148	148.898	245.401	6.100	10.679
DI Yogyakarta	1	12	87.683	91.178	3.573	6.387
Jawa Timur	11	176	288.296	773.411	7.191	18.840
Banten	1	10	512.515	142.237	1.255	1.877
Bali	1	51	93.441	51.197	2.610	2.385
Nusa Tenggara Barat	1	12	18.941	96.282	1.023	3.175
Nusa Tenggara Timur	1	25	10.041	27.205	1.222	1.849
Kalimantan Barat	1	12	25.124	78.756	1.202	1.279
Kalimantan Tengah	1	22	11.506	18.677	781	764
Kalimantan Selatan	2	14	20.785	26.457	1.216	1.553
Kalimantan Timur	5	59	42.868	41.925	1.526	1.830
Sulawesi Utara	4	16	31.721	26.223	3.067	1.396
Sulawesi Tengah	1	31	18.490	42.268	1.192	1.618
Sulawesi Selatan	4	213	64.043	240.452	3.106	7.848
Sulawesi Tenggara	1	38	18.617	41.409	974	1.442
Gorontalo	1	11	18.594	16.021	658	604
Sulawesi Barat	-	13	-	17.982	-	580
Maluku	3	25	14.778	28.930	1.433	843
Maluku Utara	1	16	7.101	19.002	515	907
Papua Barat	2	17	4.579	17.135	474	653
Papua	2	42	15.108	28.243	799	1.290
<b>Indonesia</b>	<b>96</b>	<b>3.093</b>	<b>1.812.427</b>	<b>4.009.716</b>	<b>64.885</b>	<b>141.756</b>

Catatan/Note: <sup>1</sup> Termasuk Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik/Including Institute, College, Academy, and Polytechnic  
 Sumber/Source: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Ministry of Education and Culture

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2014*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 144.

Berdasarkan data pada Tabel 3, mahasiswa yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun

2012/2013 adalah 5.822.143 orang. Rasio dari jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta adalah 1:2. Jumlah ini belum termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang beroperasi di bawah Kementerian Agama.

Jumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang bernaung di bawah Kementerian Agama pada tahun 2012/2013 adalah 601.312 orang. Dengan demikian, total mahasiswa Indonesia adalah 6.423.455 orang. Jumlah ini setara dengan 2,6% dari jumlah penduduk Indonesia.

**Tabel 4.** Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di bawah Kementerian Agama Menurut Provinsi Tahun 2012/2013

Provinsi Province	Jumlah Perguruan Tinggi Number of Universities		Jumlah Mahasiswa Number of Students		Jumlah Tenaga Edukatif Number of Lecturers	
	Negeri State	Swasta Private	Negeri State	Swasta Private	Negeri State	Swasta Private
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4	19	21 439	11 734	659	891
Sumatera Utara	2	36	11 052	19 089	524	1 144
Sumatera Barat	3	20	13 070	15 991	595	769
Riau	1	21	19 301	10 769	671	698
Jambi	2	16	11 240	8 821	403	651
Sumatera Selatan	3	11	5 565	7 809	300	523
Bengkulu	1	5	7 743	7 787	221	87
Lampung	2	10	12 742	5 745	579	569
Kepulauan Bangka Belitung	1	-	1 508	-	109	-
Kepulauan Riau	1	6	-	1 509	-	139
DKI Jakarta	-	13	-	12 924	-	1 243
Jawa Barat	4	105	14 567	28 567	1 074	2 134
Jawa Tengah	6	19	33 301	20 428	941	1 461
DI Yogyakarta	1	15	12 427	6 123	498	401
Jawa Timur	1	19	41 357	27 385	1 303	3 906
Banten	2	6	27 525	6 405	1 074	679
Bali	-	2	-	345	-	67
Nusa Tenggara Barat	1	21	6 932	20 684	390	789
Nusa Tenggara Timur	-	2	-	157	-	28
Kalimantan Barat	1	1	3 385	3 385	109	230
Kalimantan Tengah	1	4	2 097	3 363	88	154
Kalimantan Selatan	1	10	6 071	5 698	290	390
Kalimantan Timur	1	10	1 549	3 645	89	228
Sulawesi Utara	1	-	1 212	-	69	-
Sulawesi Tengah	1	5	2 259	3 259	156	243
Sulawesi Selatan	4	24	24 218	12 716	1 009	908
Sulawesi Tenggara	1	7	1 929	2 398	97	263
Gorontalo	1	-	3 047	-	139	-
Sulawesi Barat	-	6	-	2 455	-	294
Maluku	1	4	5 332	2 991	130	161
Maluku Utara	1	2	2 285	777	97	40
Papua Barat	1	2	278	730	19	36
Papua	1	3	549	570	34	86
<b>Indonesia</b>	<b>53</b>	<b>612</b>	<b>297 903</b>	<b>303 409</b>	<b>11 667</b>	<b>19 212</b>

Catatan/Note: <sup>1</sup> Termasuk Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik/Including Institute, College, Academy, and Polytechnic  
 Sumber/Source: Kementerian Agama/Ministry of Religious Affairs

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2014*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 145.

## ***Kekuatan, Kemampuan, dan Penggelaran Pertahanan***

Indonesia mempunyai kekuatan pertahanan militer yang sangat kecil atau minim. Namun, kekuatan pertahanan nirmiliternya sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka membangun postur pertahanan semesta. Kuantitas alutsista dan personel TNI masih belum memadai. Apalagi anggaran pertahanan yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia mempunyai lebih dari 6 juta mahasiswa yang dapat dikembangkan jiwa bela negaranya. Mahasiswa merupakan kelompok yang sangat potensial untuk dibentuk sesuai dengan karakter pertahanan dan jati diri bangsa Indonesia. Mahasiswa berada pada usia remaja hingga produktif, pada masa usia ini, mereka mempunyai kecenderungan untuk mencari jati diri. Selain itu, pada masa tersebut, mahasiswa lebih mudah untuk memahami dan mempelajari banyak hal, termasuk bela negara. Hal yang paling penting adalah mahasiswa merupakan cikal bakal generasi yang akan memasuki dunia kerja. Idealisme dan rasa kecintaan pada tanah air harus dibangun selama perkuliahan, sehingga mahasiswa akan bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan negara.

Pelatihan-pelatihan yang tepat dan sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa serta tujuan pendidikan bela negara dapat dikombinasikan, sehingga mereka dapat memahami cara membangun, membela, dan mempertahankan Indonesia sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pelatihan-pelatihan ini tidak akan menyerap anggaran yang besar, seperti yang terjadi sekarang. Dengan demikian, ada efisiensi waktu dan dana serta efektivitas untuk membangun kekuatan komponen cadangan dan sikap bela negara.

Hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan pelatihan ala militer dalam pendidikan bela negara tersebut. Mahasiswa yang dilatih dengan cara militer dan diminta untuk bergabung sebagai komponen cadangan menyebabkan peningkatan jumlah prajurit secara signifikan. Sebanyak 395.500 orang prajurit ditambah dengan 6.423.455 orang mahasiswa yang bercikal bakal menjadi prajurit menunjukkan lonjakan jumlah prajurit. Hal ini menyebabkan anggaran lebih banyak diserap untuk kesejahteraan prajurit, sedangkan permasalahan alutsista yang belum mencapai MEF dipastikan terbengkalai.

Permasalahan krusial lainnya adalah pertahanan nirmiliter yang terbengkalai. Mahasiswa dipersiapkan untuk membangun Indonesia dari pelbagai sektor kehidupan bernegara. Jika mahasiswa dididik secara militer, kreativitas dan kemampuannya akan surut. Hal ini belum menyangkut kondisi psikis mahasiswa dengan adanya pendidikan dengan sistem militer. Oleh karena itu, keberadaan pelatihan militer dalam kurikulum bela negara di tingkat perguruan tinggi perlu diperhatikan.

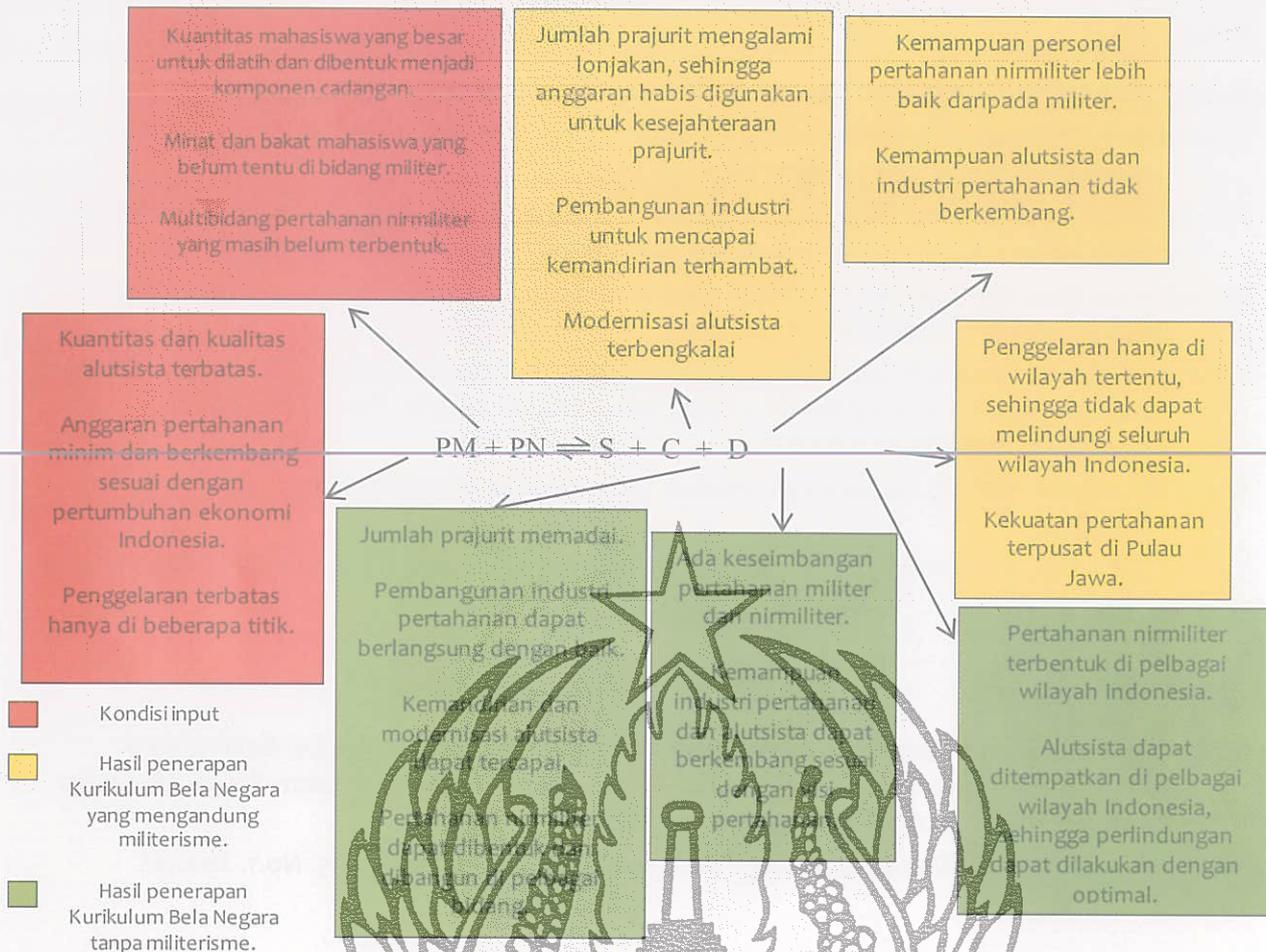
Pada tataran kemampuan, komponen militer dan nirmiliter Indonesia masih belum memadai, terutama dalam hal penguasaan teknologi pertahanan. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan industri pertahanan dan nasional dalam menciptakan suatu peralatan militer secara mandiri. Selain itu, penelitian dan pengembangan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan pertahanan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, kemampuan pertahanan Indonesia masih perlu perbaikan.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas alutsista merupakan permasalahan pertama dalam penggelaran militer. Hal ini yang menyebabkan pengawasan di wilayah perbatasan masih sangat minim. Perbatasan darat, laut, dan udara Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan, baik pada tataran domestik maupun antarnegara.

Sementara itu, pertahanan nirmiliter juga mengalami permasalahan yang cukup krusial terkait dengan penggelaran. Demografi Indonesia terfokus di Pulau Jawa. Begitupula dengan industri nasional dan pertahanan. PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT LAN, dan Pertamina merupakan contoh-contoh perusahaan nasional yang berada di Pulau Jawa.

Kondisi pertahanan militer dan nirmiliter Indonesia saat ini sudah menunjukkan ketimpangan sistem. Ketimpangan ini diperparah dengan adanya kebijakan bela negara yang bersifat militer. Ketimpangan tersebut dapat terlihat dalam pola yang digambarkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Pola Interaksi Sistem Pertahanan Semesta dengan Kurikulum Bela Negara



Sumber: Diolah oleh Penulis

### Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum bela negara yang mengandung unsur militerisme menimbulkan ketimpangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Oleh karena itu, kurikulum bela negara perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan konsep sistem pertahanan semesta yang mendorong setiap warga negara berpartisipasi aktif dalam mempertahankan negara di pelbagai lini. Pendidikan bela negara dapat diterapkan ditataran perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan bibit potensial yang akan meneruskan pembangunan bangsa, sehingga nilai-nilai yang menjadi tujuan bela negara dapat dikembangkan dalam kurikulum bela negara di tataran perguruan tinggi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2006. *Indonesia 2005—2025 Buku Putih*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Sunarya, Y. dan Setiabudi, A. 2009. *Mudah dan Aktif Belajar Kimia: untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- The International Institute for Strategic Studies. 2014. *The Military Balance 2014*. New York: Routledge.
- Yusgiantoro, P. 2014. *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### Jurnal

- Direktorat Pengkajian Bidang Pertahanan dan Keamanan. 2013. "Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. Edisi 15. Mei.
- Muthanna, KA. 2011. "Military Diplomacy." *Journal of Defense Studies*, Vol. 5. No.1. Januari.

### Laporan Penelitian/Tesis

- Bank Dunia. 2014. "Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif terhadap Pasar Kerja?". *Policy Brief 8922*. Mei.
- Matondang, E. 2015. *Anggaran Pertahanan sebagai Dinamisator Diplomasi Pertahanan dalam Joint Development Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment (Periode 2009—2014)*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

### Website

- Anonim, "Apa beda bela negara dan wajib militer?"  
[m.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709397/apa-beda-bela-negara-dan-wajib-militer](http://m.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709397/apa-beda-bela-negara-dan-wajib-militer), 14 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015.
- Anonim, "Menteri Pertahanan buka program bela negara,"  
[www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/20/151022\\_indonesia\\_bela\\_negara](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/20/151022_indonesia_bela_negara), 22 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015.

## Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

## Lain-lain

Matondang, E. 2015. "Defense Diplomacy on Indonesia's Perspective," makalah dalam *Short Course in Defense Diplomacy IDU* yang dilaksanakan di *Naval Postgraduate School*. Monterey. 31 Juli.



